



# Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 7, No. 1, 2021 (74-99)

## INTERVENSI KOMUNITAS MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUHAMMADIYAH PADA KELOMPOK MARGINAL PIYUNGAN YOGYAKARTA

Siti Nur Fitriyani dan Tri Ahmad Faridh

**Abstrak:** *Majelis Pemberdayaan Muhammadiyah Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah telah melaksanakan intervensi untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup para kaum marginal, yakni pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan dengan menerapkan dua model intervensi komunitas, yakni model pengembangan masyarakat lokal dan model perencanaan sosial. Kajian ini hendak menggambarkan keterkaitan antar komponen model intervensi komunitas dalam merealisasikan kombinasi model-model intervensi komunitas yang diterapkan sebagai usaha memperbaiki kesejahteraan kelompok marginal tersebut. Kajian ini adalah kajian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Uraian komponen model intervensi akan dideskripsikan dalam komponen model intervensi yang dikembangkan oleh Jack Rothman dan kawan-kawan. Hasil kajian menggambarkan bahwa kombinasi kedua model intervensi diselenggarakan karena tuntutan struktur dan masalah yang ada juga mencerminkan kebutuhan lahirnya kedua model intervensi tersebut, sehingga terjadi sinergi tujuan model-model intervensi yang diterapkan. Tentu dengan demikian, menjadikan komponen strategi dasar, taktik dan teknik perubahan yang diterapkan juga akan terhubung pada tujuan-tujuan tersebut. Selain itu terjadi pemanfaatan komponen intervensi secara lebih efisien, karena dapat menunjang penerapan model-model intervensi secara sekaligus.*

**Kata kunci:** *Kelompok Marginal, Kombinasi Model Intervensi Komunitas, Komponen Model Intervensi*

**Abstract:** *MPM PP Muhammadiyah has implemented interventions to improve the quality of the welfare of the marginalized, namely scavengers at the TPST Piyungan by applying two models of community intervention, locality development model, and social planning model. This study aims to describe the relationship between components of the community intervention model in realizing a combination of community intervention models that are applied as an effort to improve the welfare of these marginalized groups. This study is a qualitative study with a literature study approach. The description of the components of the intervention model will be mapped into the components of the intervention model developed by Jack Rothman and colleagues. The results of the study illustrate that the combination of the two intervention models is carried out because the demands of the existing structures and problems also reflect the need for the birth of the two intervention models, so that there is a synergy of the goals of the intervention models applied. Of course, thus, making the basic strategy components, tactics and techniques of change that are applied will also be connected to these goals. In addition, there is a more efficient use of the intervention component, because it can support the implementation of intervention models simultaneously.*

**Keywords:** *Marginal Groups, Combined Community Intervention Model, Intervention Model Components*

## Pendahuluan

Dalam rangka pemberdayaan pada level komunitas, terdapat tiga model intervensi komunitas populer yang dikembangkan secara teoritis oleh para ahli, yakni pengembangan masyarakat lokal, perencanaan/kebijakan sosial, dan aksi sosial. Adi (2013) menyebutkan pembagian tiga model itu didasarkan pada formulasi yang dilakukan oleh Jack Rothman dalam karya klasiknya yang populer, *Three Models of Community Organization Practice* (yang selanjutnya teorinya dikembangkan bersama kawan-kawanya seperti Tropman, Cox, dan Erlich). Rothman menyebut tiga model itu dengan istilah *locality development*, *social planning* dan *social action* (Suharto, 2014). Glen menyebutkan tiga model itu dengan istilah *community development*, *community services approach*, dan *community action* (Adi, 2015).

Dalam melakukan intervensi komunitas, tentu tidak sembarang model intervensi bisa diterapkan untuk dapat menghasilkan perbaikan keadaan. Adi menjelaskan bagaimana intervensi terhadap para pengemis misalnya, alih-alih berusaha memperbaiki kehidupan mereka namun justru yang terjadi adalah menyuburkan eksistensi mereka dengan bantuan-bantuan yang diberikan (Adi, 2013). Sehingga perlu pemilihan model intervensi secara tepat, atau bahkan mungkin kombinasi model-model intervensi secara tepat. Suharto menjelaskan bahwa secara teoritis di antara model pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial dalam praktiknya dapat bersentuhan satu sama lain. Bahkan setiap komponen model intervensi bisa dipergunakan secara kombinasi dan simultan berdasarkan kebutuhan dan situasi yang ada (Suharto, 2014).

Praktik intervensi komunitas yang mengkombinasikan model-model intervensi terdapat pada praktik yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah terhadap kelompok marginal, yakni para pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, yang merupakan PSPT yang menampung jumlah sampah terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena merupakan tempat pembuangan sampah akhir bagi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (Farid, IMEJ, 2019). Intervensi itu dilakukan setelah melihat keadaan kelompok pemulung di TPST Piyungan yang memprihatinkan dan termarginalkan, dan didorong oleh semangat merealisasikan model dakwah pencerahan berbasis komunitas, yang salah satu bentuknya adalah dakwah bagi kalangan kelompok marginal. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah bergerak mengintervensi komunitas marginal tersebut dengan fokus memperbaiki aspek kesehatan, lingkungan, sosial, ekonomi, bahkan spiritual bagi para pemulung di TPST Piyungan (Ramdani, 2018). Usaha intervensi ini telah dilakukan sejak tahun 2016. Adapun penggunaan model-model intervensi secara kombinasi tersebut dapat dilihat pada indikasi-indikasi berikut ini.

Model pengembangan masyarakat lokal, dapat diindikasikan pada realitas intervensi MPM PP Muhammadiyah yang menyatukan para pemulung di wilayah TPST Piyungan dalam satu wadah bernama Komunitas Pemulung Mardiko (Makaryo Adi Ngayogyakarta)

yang memberikan fungsi pengorganisasian yang sangat bermanfaat bagi kepentingan bersama para pemulung. Dengan berdirinya komunitas ini, selain para pemulung dapat memiliki citra yang lebih positif karena selama ini sering dipandang sebagai *trouble maker* (Ramdani, 2018), juga menjadikan kelompok pemulung ini lebih terorganisasi dalam menciptakan ketertiban, keamanan, penyelenggaraan usaha kesehatan dan kebersihan, kerukunan antar pemulung, serta menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak lain, sebagaimana yang digambarkan dalam aturan-aturan komunitas untuk para anggotanya (Ramdani, 2018). Penyatuan ini dipandang perlu sebab pada awalnya pemulung di TPST Piyungan yang jumlahnya sekitar 600-an pemulung masih terbagi menjadi beberapa kelompok mengikuti 15 pengepul yang ada di TPST Piyungan (Farid, IMEJ, 2019).

Adapun model perencanaan sosial oleh MPM PP Muhammadiyah terhadap kelompok marginal tersebut, didapati pada serangkaian program layanan Edukasi dan peningkatan PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) terhadap pemulung, serta fasilitas pemeriksaan dan perawatan kesehatan bagi para pemulung yang tergabung dalam Komunitas Mardiko. Serangkaian program ini merupakan program penting dan utama dalam proses intervensi di TPST Piyungan yang diselenggarakan oleh MPM PP Muhammadiyah (Ramdani, 2018). Persoalan kesehatan pada kelompok ini menjadi penting, karena para pemulung di TPST Piyungan setiap harinya bekerja di gunung sampah bersama dengan ribuan sapi milik pemulung dan masyarakat yang diliarikan di TPST Piyungan (Farid, DIMAS, 2019). Kondisi tempat kerja pemulung tersebut sangatlah kotor, bau sampah yang menyengat, lalat yang banyak, dan becek karena air sampah (OTW MPM TVMU, 2018). Di sisi lain kesadaran para pemulung di TPST Piyungan akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah, apalagi belum tersedianya sarana prasarana yang menyediakan air bersih di sekitar tempat mereka memulung. Akibat kebanyakan dari pemulung tidak mencuci tangan mereka terlebih dahulu ketika hendak makan pada saat istirahat (OTW MPM TVMU, 2018), dan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pemulung kesulitan mengambil air wudu untuk menjalankan salat lima waktu (Farid, DIMAS, 2019).

Masalah kesehatan juga menjadi hal yang penting, juga sebab para pemulung itu ada yang telah bekerja di sana bisa antara 15 hingga 22 tahun. Dalam jangka waktu yang lama tersebut, memang para pemulung merasa kondisi kesehatannya baik-baik saja. Namun faktanya dari hasil diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat, dijumpai banyak pemulung yang batuk tidak sembuh-sembuh, sesak nafas, gatal-gatal, sakit perut dan sebagainya (Farid, IMEJ, 2019). Dalam tulisannya Widyaningsih dan Ma'ruf menyebutkan beberapa pemulung juga sempat mengalami berbagai penyakit, khususnya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), *mialgia* (nyeri otot), *dermatitis* (radang kulit), *dispepsia* (nyeri perut) dan sakit kepala (Widyaningsih dan Ma'ruf, 2017).

Selain itu, model perencanaan sosial yang dilakukan oleh MPM PP Muhammadiyah juga dapat ditemukan pada serangkaian proses advokasi para pemulung yang melahirkan program-program kesejahteraan dari pemangku kekuasaan yang terkait demi kepentingan perbaikan nasib para pemulung di TPST Piyungan. Intervensi ini menjadi bagian penting

dari serangkaian proses intervensi komunitas terhadap kelompok pemulung, karena status mereka sebagai kelompok yang termarginalkan. Kelompok marginal adalah masyarakat yang tidak mendapat tempat layak dalam hidup bermasyarakat, sehingga “terpinggirkan” secara sosial, ekonomi, politik. Mereka menjadi terabaikan karena kebijakan negara dan keadaan sosial lain yang kurang berpihak, baik secara kultural maupun struktural. Mereka tidak mendapatkan hak-haknya seperti warga negara lainnya untuk mengakses, memperoleh manfaat, ataupun terlibat dalam pembangunan yang menguntungkan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Pemulung di TPST Piyungan ini menjadi salah satu kelompok marginal dalam masyarakat karena menggantungkan hidup pada sampah-sampah, atau barang-barang yang telah dibuang oleh masyarakat, sehingga kemudian terstigma sebagai orang yang mencari nafkah dari tempat-tempat atau sesuatu yang “kotor” (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015). Kelompok pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan dianggap sebagai *trouble maker* (Ramdani, 2018). Padahal jika diteliti mendalam justru seharusnya mereka layak disebut sebagai pahlawan lingkungan karena telah membantu pemerintah dalam memilih dan mengelola sampah, sehingga dalam 1 tahun bisa berkontribusi dalam mengurangi 4.800 ton debit sampah di TPST Piyungan (Farid, DIMAS, 2019). Pemulung juga punya andil dalam pencapaian Adipura Daerah Istimewa Yogyakarta, sebab 11% nilai dari Adipura tersebut dari TPST Piyungan. Hanya saja sayang, pemulung di TPST Piyungan tidak dianggap sebagai orang yang berjasa terhadap lingkungan (OTW MPM TVMU, 2018).

Walau sebenarnya mereka ini pahlwan lingkungan, nampaknya kesejahteraan mereka kurang diperhatikan dikarenakan tidak adanya program bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya dalam hal jaminan kesehatan dan kesempatan bekerja yang lebih layak. Kelompok pemulung ini terabaikannya karena mulai tahun 2016, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial bahwa pemulung tidak masuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga tidak berhak mendapatkan berbagai program dari pemerintah (Farid, IMEJ, 2019). Dari sisi ekonomi, penghasilan pemulung tersebut memang memungkinkan jika dikalkulasikan dalam satu bulan hampir bisa mencapai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bantul yang pada tahun 2016 sebesar Rp 1.297.700 (Firmansyah, 2020). Namun ini tidak mengubah kenyataan adanya kerentanan kesehatan yang perlu diupayakan perlingkungannya.

Memang pernah ada program pemeriksaan kesehatan dari Dinas Kesehatan bersama salah satu rumah sakit, namun pemulung dan masyarakat di sekitar TPST Piyungan yang datang sedikit orang, antara 10-15 orang. Hal ini karena pendekatan kurang persuasif, hanya mengumumkan saja misalnya hari ini pemerintah ada program pemeriksaan kesehatan silahkan datang. Sehingga kurang maksimal dan kurang tersosialisasi dengan baik (OTW MPM TVMU, 2018). Jaminan kesehatan mereka menjadi lebih sangat rentan, juga karena sebagian besar pemulung ternyata tidak memperoleh akses program layanan kesehatan gratis walau mempunyai kartu Jaminan

Kesehatan Nasional karena umumnya pemulung tetap terdaftar di fasilitas layanan tingkat pertama (FKTP) di daerah asal sesuai alamat di KTP, di mana selain dari Bantul mereka Gunungkidul, Yogyakarta, Kulonprogo, Grobogan, Magelang, Klaten, Wonogiri, Blora, Riau, Flores, dan lainnya (Farid, IMEJ, 2019). Di sinilah MPM Muhammadiyah memberikan intervensi untuk mengadvokasi para pemulung untuk menyalurkan aspirasi kesejahteraannya kepada pemerintah, untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan dan penghidupan yang lebih layak dari program dan kebijakan dari pemerintah.

Melihat adanya kombinasi penerapan model-model intervensi komunitas di atas, maka fokus kajian ini akan membahas tentang bagaimana keterkaitan antar komponen dalam merealisasikan kombinasi model-model intervensi komunitas sebagai usaha memperbaiki kesejahteraan kelompok marginal di TPST Piyungan oleh MPM PP Muhammadiyah. Sehingga kajian ini hendak menggambarkan keterkaitan antar komponen dalam merealisasikan kombinasi model-model intervensi komunitas sebagai usaha memperbaiki kesejahteraan kelompok marginal, yakni kelompok pemulung di TPST Piyungan oleh MPM PP Muhammadiyah.

Dengan memahami keterkaitan antar komponen dalam penyelenggaraan kombinsai model intervensi, akan memungkinkan untuk mempelajari efisiensi keberadaan dan penggunaan komponen-komponen intervensi komunitas dalam merealisasi usaha perbaikan kehidupan pada suatu komunitas, serta memungkinkan untuk mendudukan peranan model-model dalam suatu proses intervensi pada satu komunitas tersebut secara sinergis.

Pada studi terdahulu terkait intervensi pada komunitas marginal, terdapat penelitian Irsyadiana Rachmah Sari (2018), Skripsi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, yang meneliti tentang “Intervensi Komunitas Eks Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan dalam Program Desaku Menanti di Kota Malang (Studi di Kampung Kesetiakawanan Margo Mulyo, Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang). Persamaannya adalah penelitian ini membahas intervensi komunitas marginal, namun intervensi yang dilakukan hanya satu model yakni perencanaan sosial, sedang dalam kajian penulis ini terdapat dua model intervensi sekaligus.

Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dan Sukma Paramastuti dari STID Al-Hadid, Surabaya dalam INTELEKSIA-Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah Volume 01 – No. 02 Januari 2020. Dengan judul penelitian Intervensi Komunitas “RIFKA ANNISA” Yogyakarta pada Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Persamaan kajiannya juga mengenai intervensi komunitas yang mengalami masalah marginalisasi. Adapun perbedaannya selain bentuk komunitas kajian penulis yang dari kalangan pemulung, adalah pada fokus kajian yang pada kajian penulis tidak hanya menggambarkan pelaksanaan intervensinya saja, namun juga melihat kombinasi dan keterkaitan antar komponen pada model-model intervensi yang dilakukan di penerima layanan.

Adapun metode kajian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Dengan demikian kajian ini bertujuan untuk melihat dan mengungkap suatu keadaan atau realitas pada konteks tertentu serta menemukan pemahaman yang mendalam mengenai suatu masalah yang sedang diteliti (Yusuf, 2014). Adapun dengan pendekatan studi kepustakaan, maka kajian akan menelusuri bahan bacaan, baik itu buku atau jurnal ilmiah yang menulis atau membahas kajian berkaitan dengan masalah yang ditetapkan (Semiawan, 2010). Data-data yang berkaitan dengan praktik model intervensi dan komponennya akan dikumpulkan dari berbagai sumber yang didapat dengan menggunakan teknik triangulasi dan dilakukan terus menerus sampai datanya jenuh. Data kemudian dianalisis untuk menemukan gambaran kombinasi dan keterkaitan antar komponen-komponen model intervensi komunitas yang diterapkan pada komunitas marginal di TPST Piyungan.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yakni jurnal-jurnal, maupun penelitian lain, serta sumber-sumber publikasi lain yang menggambarkan data-data yang mengandung informasi proses intervensi MPM PP Muhammadiyah terhadap kelompok pemulung di TPST Piyungan. Sumber itu antara lain: skripsi Gandi Alan Marwansyah pada tahun 2018, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, berjudul “Analisis Peran Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Alur Pengelolaan Sampah oleh Sektor Informal di TPST Piyungan, Bantul, Yogyakarta”; Skripsi Febri Ramdani pada tahun 2018, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Menurut Muhammadiyah (Studi Kasus di TPST Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta)”; Jurnal Muhammad Rifa’at Adikarti Farid, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Peran Pemuda Majelis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu”; Jurnal Tri Widyaningsih dan Ahmad Ma’ruf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah pada tahun 2017 yang berjudul “Eksternalitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”; Jurnal Muhammad Rifa’at Adikarti Farid, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Derap Langkah Pemuda sebagai Fasilitator Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan”; Video Layar Jogja, Pemberdayaan Komunitas Pemulung Piyungan bersama MPM Muhammadiyah, (Publish : 3 Juli 2017); Video OTW MPM TVMU, berjudul OTW-Obrolan Tentang Warga—Potret TPST Piyungan.; dan sumber-sumber publikasi lainnya.

### **Pengertian intervensi komunitas marginal**

Dalam kajian ilmu kesejahteraan sosial, intervensi komunitas memiliki beberapa istilah yang berbeda di beberapa negara. Di Inggris dan Australia intervensi komunitas disebut sebagai *community work* atau *community practice*. Sedang di Amerika Serikat menggunakan istilah *community organization* atau *community intervention*. Adapun di

Indonesia sendiri pada dasawarsa 1970 hingga 1990-an lebih dikenal dengan istilah “pengorganisasian dan pengembangan masyarakat” (Adi, 2015).

Intervensi komunitas adalah merupakan suatu intervensi sosial (upaya terencana dalam merubah keadaan masyarakat) yang dilakukan oleh subjek perubahan terhadap sasaran/objek perubahan dalam lingkup komunitas/level mezzo (Adi, 2013). Dalam pengembangan masyarakat, intervensi komunitas merupakan bagian dari strategi dalam melakukan pengembangan masyarakat, khususnya dalam lingkup komunitas atau organisasi. Dikatakan strategi sebab intervensi komunitas merupakan langkah-langkah yang terencana dan cermat di dalam mengatasi persoalan komunitas yang diberdayakan.

Komunitas marginal adalah kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap tidak mendapat tempat layak dalam hidup bermasyarakat, sehingga “terpinggirkan” secara sosial, ekonomi, politik. Mereka adalah korban kebijakan negara dan keadaan sosial lain yang kurang berpihak kepada mereka, baik secara kultural maupun struktural. Mereka ini tidak mendapatkan hak-haknya seperti warga negara lainnya untuk mengakses, memperoleh manfaat, serta terlibat dalam pembangunan yang menguntungkan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015). Kelompok ini dapat merupakan kelompok migran yang datang ke kota untuk mengais rezeki namun mereka tidak memiliki ketrampilan (*unskilled labour*). Sebagian besar mereka bekerja pada sektor informal atau berprofesi sebagai buruh, seperti pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, anak jalanan, buruh termasuk buruh perempuan, kelompok masyarakat yang tergusur oleh pembangunan, PSK (Pekerja Seks Komersial), pengemis, gelandangan, dan lain sebagainya (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Kadang kelompok marginal ini tidak selalu dalam keadaan miskin dalam hal ekonomi, namun mereka mengalami kemiskinan pada aspek sosial lainnya. Kelompok marginal ini dapat mengalami *deprivation trap* (perangkap kemiskinan) yang berupa lima unsur, yaitu kemiskinan (ekonomi) itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan/isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kadang kelima unsur ini saling berkaitan sehingga menjadi perangkap kemiskinan yang betul-betul mematikan peluang hidup seseorang orang (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Tanpa hadirnya negara dengan kebijakan sosial dan pembangunannya, maka mereka semakin lemah posisinya hingga mengalami ketertinggalan pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik secara luas. Mereka akan mengalami kemiskinan, tidak memiliki alternatif pekerjaan, dan hidup penuh dengan ketidakpastian, teralienasi dari pembangunan, sehingga mereka mengalami akumulasi kemiskinan baik miskin secara ekonomi maupun miskin secara sosial, bahkan dikhawatirkan dapat mengalami kondisi miskin iman (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015). Dengan demikian perlu perhatian dan usaha yang serius untuk menangani kelompok ini, agar mereka juga dapat meraih keadaan sejahtera sebagaimana yang digambarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, yakni kondisi terpenuhinya aspek kebutuhan material,

spiritual dan sosial sehingga individu dapat melaksanakan perannya di dalam masyarakat (Syamsuddin, 2017).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa intervensi komunitas marginal adalah merupakan suatu intervensi sosial (upaya terencana dalam merubah keadaan masyarakat) yang dilakukan oleh subjek perubahan terhadap sasaran/objek perubahan dalam lingkup komunitas (level mezzo) dengan sasaran spesifiknya adalah kelompok masyarakat yang “terpinggirkan” secara sosial, ekonomi, politik. Dengan kata lain ini adalah upaya terencana atas perbaikan kehidupan kepada korban kebijakan negara dan keadaan sosial lain yang kurang berpihak kepada mereka, baik secara kultural maupun struktural yang telah mengakibatkan mereka tidak mendapat tempat layak dalam hidup bermasyarakat, tidak mendapatkan hak-haknya seperti warga negara lainnya untuk mengakses, memperoleh manfaat, serta terlibat dalam pembangunan yang menguntungkan.

### **Ragam Model Intervensi Komunitas**

Intervensi komunitas sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat, dalam prosesnya terdapat variabel-variabel yang saling terhubung sehingga membentuk suatu pola yang khas. Pola yang khas tersebut disebut sebagai model intervensi komunitas. Berdasarkan pada apa yang dikemukakan oleh Rothman dan Tropman, terdapat tiga model intervensi komunitas, yaitu: (a) pengembangan masyarakat lokal, (b) perencanaan sosial, dan (c) aksi sosial.

Pengembangan masyarakat lokal adalah proses intervensi dengan tujuan menciptakan kemajuan sosial-ekonomi melalui partisipasi aktif, serta inisiasi anggota masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang diintervensi tidak dianggap sebagai klien bermasalah, namun lebih kepada masyarakat yang memiliki potensi namun belum sepenuhnya dikembangkan. Oleh karenanya pekerja sosial akan membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan untuk meraih tujuan yang diinginkan. Pengembangan masyarakat lokal lebih berorientasi “tujuan proses” (*process goal*) ketimbang “tujuan tugas” atau “tujuan hasil” (*task/product goal*). Setiap anggota komunitas bertanggungjawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang dianggap tepat. Inti dari proses ini adalah pengembangan kepemimpinan lokal, strategi kemandirian, informasi, komunikasi, relasi dan keterlibatan anggota masyarakat (Suharto, 2014). Adi (2013) menyebut pengembangan masyarakat lokal dilakukan dengan melalui pendekatan konsensus.

Adapun perencanaan sosial adalah proses pragmatis untuk menentukan keputusan, dan menetapkan tindakan yang dianggap mampu memecahkan masalah sosial tertentu secara spesifik, seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan, kesehatan yang rendah (misal usia harapan hidup rendah, kematian bayi tinggi, kekurangan gizi), dan lain-lain. Perencanaan sosial lebih berorientasi pada “tujuan tugas” (*task goal*). Komunitas adalah klien yang merupakan kelompok kurang beruntung atau rawan mengalami masalah sosial-ekonomi. Pekerja sosial berperan sebagai perencana

layanan sosial yang akan diberikan kepada konsumen/penerima layanan (*beneficiaries*). Keterlibatan penerima layanan dalam pembuatan kebijakan, penentuan tujuan, serta pemecahan masalah tidak merupakan keharusan, karena pengambil keputusan layanan sosial adalah para pekerja sosial baik dari lembaga pemerintah maupun swasta (LSM). Pekerja sosial dipandang sebagai *expert* dalam meneliti, menganalisis masalah dan kebutuhan komunitas, serta merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program layanan kemanusiaan (Suharto, 2014). Adi (2013) menyebut perencanaan sosial dilakukan dengan pendekatan kepatuhan atas perencanaan dan kebijakan sosial yang diambil.

Sedangkan aksi sosial adalah perubahan-perubahan fundamental atas kelembagaan serta struktur masyarakat melalui pendistribusian kekuasaan, sumber, dan pengambilan keputusan. Komunitas dipandang sebagai klien yang seringkali merupakan korban ketidakadilan struktur sosial. Mereka miskin sebab dimiskinkan, lemah sebab dilemahkan, atau tak berdaya sebab tidak diberdayakan oleh elit pemegang kuasa sumber ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Aksi ini berorientasi baik tujuan proses maupun tujuan hasil. Komunitas akan diorganisasi melalui penyadaran, pemberdayaan dan melakukan tindakan aktual untuk mengubah struktur kekuasaan sehingga lebih memenuhi nilai demokrasi, pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*) (Suharto, 2014). Adi (2013) menyebut aksi sosial dilakukan dengan pendekatan konflik.

### **Komponen-komponen antar model intervensi komunitas**

Ketiga model intervensi komunitas yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial, sebagaimana dalam Rothman dan Tropman, dapat dibedakan atas dua belas komponen atau variabel sebagai berikut:

#### 1. Kategori tujuan intervensi terhadap komunitas yang diberdayakan

Pada model pengembangan masyarakat lokal intervensi lebih bertujuan pada “tujuan proses”, di mana masyarakat diintegrasikan dan dikembangkan kapasitasnya agar komunitas dapat memecahkan masalah mereka sendiri secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri serta demokratis. Pekerja sosial akan memapankan relasi kerjasama antar anggota untuk menciptakan struktur pemecahan masalah komunitas atau bahkan mengembangkan dan memelihara sistem pemecahan masalah. Pekerja sosial juga menstimulasi komunitas untuk mempunyai minat dan partisipasi yang luas terhadap masalah-masalah komunitas, mengembangkan sikap suka bekerja sama, selain juga meningkatkan peran kepemimpinan dalam internal komunitas itu (Adi, 2013). Suharto (2014) memberi ulasan bahwa orientasi pengembangan masyarakat lokal ini dengan tujuan kemandirian, integrasi dan kemampuan masyarakat.

Sedangkan pada model perencanaan sosial, penekanan tujuannya adalah pada *task goal* (tujuan penyelesaian tugas) yakni berorientasi penyelesaian tugas-tugas, atau mengatasi masalah gangguan sistem sosial melalui penyediaan atau pengembangan sistem layanan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang kongrit Adi (2013). Suharto (2014) menjelaskan orientasi perencanaan sosial adalah orientasi hasil pemecahan masalah sosial yang ada di masyarakat, dengan tugas-tugas yang dilaksanakan.

Adapun model aksi sosial, mengarah pada kedua tujuan yaitu *process goal* sekaligus *task goal* dengan menekankan pada upaya perubahan praktik-praktik struktural tertentu, atau pembentukan kebijakan baru (Adi, 2013). Suharto (2014) mengurai lebih lanjut dengan menyatakan bahwa orientasi aksi sosial berorientasi perubahan struktur kekuasaan, lembaga dan distribusi sumber daya.

## 2. Struktur dan masalah Komunitas

Pada model pengembangan masyarakat lokal, komunitas lokal sering ditutupi oleh masyarakat yang lebih luas dan masalah yang dihadapi adalah masalah relasi antarpribadi yang signifikan, keterampilan yang rendah dalam pemecahan masalah sosial, keterasingan, ataupun ikatan tradisional yang dipimpin oleh pemimpin konvensional, tidak demokratis dan lain sebagainya (Adi, 2013). Suharto (2014) menyebut masalah dalam model ini berkaitan dengan masalah ketidakseimbangan sosial, dan kurangnya kemampuan dalam relasi dan pemecahan masalah sosial.

Adapun pada model perencanaan sosial, komunitas dipandang terdiri atas sejumlah masalah sosial inti atau masalah khusus dengan minat dan kepentingan tertentu misalnya masalah perumahan, pengangguran, kesehatan fisik/mental, kemiskinan, dan lain sebagainya (Adi, 2013). Suharto (2014) menyebutnya dengan istilah masalah sosial nyata, seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, dan lain sebagainya.

Sedangkan pada model aksi sosial, pekerja sosial melihat adanya hierarki privilege dan kekuasaan, serta melihat adanya masalah komunitas yang mendapatkan tekanan, terabaikan, merasakan ketidakadilan dan dieksploitasi (Adi, 2013). Suharto (2014) menyebut masalah pada model ini adalah berkaitan dengan ketidakadilan, kesengsaraan, ketidakmerataan dan ketidaksetaraan.

## 3. Strategi Dasar Dalam Melakukan Perubahan

Pada model pengembangan masyarakat lokal, pemberdaya akan melibatkan komunitas sasaran dalam menentukan masalah, atau kebutuhan mereka, serta bagaimana menyelesaikan masalah tersebut (Adi, 2013). Suharto (2014) juga menyebutkan hal yang sama, bahwa strategi perubahan model ini adalah pelibatan masyarakat dalam pemecahan masalah.

Pada model perencanaan sosial, perubahan diusahakan dengan pengumpulan data-data mengenai masalah masyarakat sebelum memilih dan menentukan tindakan yang paling rasional untuk penyelesaian masalah. Selain itu, terkadang juga ada melibatkan tenaga dari luar komunitas yang membantu dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya serta mengembangkan program ke depannya (Adi, 2013). Secara ringkas Suharto (2014) menyebutkan bahwa strategi perubahannya adalah penentuan masalah, dan pengambilan keputusan melalui tindakan rasional para ahli.

Sedang model aksi sosial, strateginya adalah dengan kristalisasi isu, mendorong komunitas untuk mengorganisir diri, dan membentuk aksi massa agar dapat melawan dan menekan kelompok penguasa, agar mereka bisa mendapatkan keadilan/hak mereka (Adi, 2013).

Suharto (2014) menyebut strategi model ini dengan katalisasi, dan pengorganisasian untuk mengubah struktur kekuasaan.

#### 4. Karakteristik Taktik dan Teknik Perubahan

Model pengembangan masyarakat lokal, menekankan pada teknik kesepakatan (konsensus) dan kerjasama dari berbagai pihak baik individu, kelompok, maupun faksi melalui cara-cara diskusi (Adi, 2013). Sedang Suharto (2014) melengkapi dengan menyebutkan teknik perubahan model ini adalah dengan konsensus, diskusi kelompok, partisipasi, brain-storming, role playing, bimbingan dan penyuluhan.

Pada model perencanaan sosial, perencana menekankan pada teknik pengumpulan data dan keterampilan untuk menganalisis data dalam membuat pemecahan masalah (Adi, 2013). Sedangkan Suharto (2014) menambahkan penjelasan teknik perubahan pada model ini bahwa juga bisa dilakukan advokasi, andragogi, perumusan kebijakan dan perencanaan program.

Sedangkan pada model aksi sosial, menekankan pada teknik konflik dengan cara melakukan aksi-aksi langsung, seperti demonstrasi, negoisasi bahkan bila perlu melakukan pemboikotan untuk menuntut keadilan kepada pihak penguasa. Sehingga sangat dibutuhkan peran organisator dan mobilisator untuk melakukan pengorganisasian dan penggerakan dalam rangka merealisasikan aksi-aksi tersebut (Adi, 2013). Suharto (2014) menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik perubahan model ini dengan teknik konflik atau unjuk rasa, konfrontasi atau tindakan langsung, mobilisasi kekuatan massa, analisis kekuasaan, mediasi, agitasi, negosiasi, dan pembelaan.

#### 5. Peran Praktisi yang Menonjol

Pada model pengembangan masyarakat lokal, peran pemberdaya sebagai pemungkin (*enabler*) yaitu membantu masyarakat untuk mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menemukan dan memecahkan masalah yang dialami mereka, serta mengembangkan kapasitas secara efektif (Adi, 2013). Suharto (2014) menyebut peran praktisi pada model ini juga menyebut sebagai koordinator dan pembimbing selain sebagai pemungkin.

Sedangkan pada model perencanaan sosial, peran perencana sebagai pakar (*expert*) dalam mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan pemecahan masalah (program) dan mengimplementasikannya, serta membangun relasi dengan berbagai macam birokrasi maupun tenaga profesional dari berbagai disiplin (Adi, 2013). Suharto (2014) menyebut peran-peran praktisi pada model ini sebagai peneliti, analis, fasilitator, dan pelaksana program.

Adapun pada model aksi sosial, peran pemberdaya lebih mengarah pada peran advokat, dan aktivis (Adi, 2013). Begitu pula Suharto (2014) merinci dengan menyatakan peran praktisi adalah aktivis advokasi yang juga melakukan peran agitator, broker dan negosiator.

#### 6. Media Perubahan

Pada model pengembangan masyarakat lokal, pekerja sosial dapat menggunakan kelompok-kelompok diskusi dalam rangka membimbing kelompok menuju penemuan dan

pemecahan masalah secara kolaboratif (Adi, 2013). Suharto (2014) menyebut media model ini adalah melalui mobilisasi kelompok-kelompok kecil.

Model perencanaan sosial, media perubahannya adalah membangun relasi dengan pihak lain untuk turut dalam mewujudkan solusi atas masalah yang telah dirumuskan (Adi, 2013). Suharto (2014) menyebut media modal ini adalah melalui mobilisasi kelompok formal yang akan bergerak untuk menyelesaikan masalah yang dimaksud. Sedang pada model aksi sosial, media yang digunakan adalah dengan menciptakan dan memanipulasi pengorganisasian dan pergerakan massa untuk mempengaruhi proses politis (Adi, 2013). Suharto (2014) menyebutnya dengan mobilisasi organisasi massa dan politik.

#### 7. Orientasi Terhadap Struktur Kekuasaan

Model pengembangan masyarakat lokal, mengorientasikan struktur kekuasaan kedudukannya sebagai kolaborator yang bekerjasama dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran (Adi, 2013). Suharto menyebutkan bahwa struktur kekuasaan sebagai kolaborator, atau perwakilan dalam komunitas itu sendiri (2014).

Pada model perencanaan sosial, struktur kekuasaan berkedudukan sebagai sponsor (pendukung) atau “boss” (*empoyer*) dari perencana. Para perencana dalam memberikan layanannya, atau mengimplementasikan rencana pemecahan masalah yang telah ditetapkan dapat membutuhkan bantuan dari pihak lain (Adi, 2013). Suharto (2014) menyebut struktur kekuasaan sebagai pekerja itu sendiri dan sponsor.

Adapun pada model aksi sosial, struktur kekuasaan diposisikan sebagai pihak yang memberikan tekanan kepada mereka, sehingga menjadi sasaran yang akan dilawan dan diberikan tekanan balik (Adi, 2013). Sedang Suharto (2014) menambahkan selain struktur kekuasaan sebagai sasaran aksi, juga dapat pula struktur dominasi elit sebagai sesuatu yang harus disingkirkan.

#### 8. Batasan Penerima Layanan

Model pengembangan masyarakat lokal, penerima layanannya adalah keseluruhan komunitas dalam satu wilayah tertentu. Sedangkan model perencanaan sosial, penerima layanan bisa keseluruhan komunitas atau bisa juga segmen dalam suatu komunitas dan bisa juga komunitas fungsional tertentu yang tidak terikat wilayah lokal, sehingga bergantung dari masalah khusus apa yang hendak diselesaikan. Adapun model aksi sosial, penerima layanannya adalah segmen masyarakat tertentu yang membutuhkan layanan tetapi layanan tersebut tidak terjangkau/ditolak. Para praktisi lebih melihat kelompok tersebut sebagai teman-teman partisan yang diorganisir dan dimobilisasi pada kegiatan aksi yang akan dilakukan, daripada sekelompok klien (Adi, 2013).

#### 9. Asumsi Mengenai Kepentingan dari Kelompok-Kelompok di dalam Suatu Komunitas

Pada model pengembangan masyarakat lokal, kepentingan kelompok dan faksi dilihat secara dasar merupakan pemufakatan dan niatan baik bersama, sehingga kepentingan kelompok-kelompok selanjutnya akan membaur (Adi, 2013). Suharto (2014) menjelaskannya

bahwa kepentingan dalam modal ini adalah kepentingan umum, atau walaupun ada perbedaan-perbedaan maka akan dapat dapat diselaraskan.

Sedang pada model perencanaan sosial, karena sifatnya yang pragmatis pada penanganan masalah tertentu, maka konflik kepentingan tidak diperhatikan. Sehingga pemufakatan dan konflik sekalipun dapat ditoleransi selama tidak menghalangi pencapaian tujuan (Adi, 2013). Sedangkan Suharto (2014) menyebutkan bahwa walaupun ada kepentingan maka akan yang dapat diselaraskan, atau konflik kepentingan dapat diatasi dengan kebijakan publik yang dirumuskan.

Dalam model aksi sosial, kelompok-kelompok sosial yang ada sangat bervariasi dan sulit diambil kata mufakat bahkan bisa bertentangan, sehingga seringkali cara-cara koersif dan konflik harus dilaksanakan seperti pemboikotan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Mereka yang mempunyai kekuasaan dan *privilege* dari kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan tersebut seringkali tidak mau melepaskan keuntungan yang mereka dapat. Sehingga kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan perlu juga untuk memperjuangkan kepentingannya (Adi, 2013). Suharto (2014) menyebutkan adanya konflik kepentingan yang tidak dapat diselaraskan, atau ketiadaan sumber sehingga menjadi perebutan.

#### 10. Konsepsi Mengenai Penerima Layanan

Pada model pengembangan masyarakat lokal, komunitas sasaran pemberdayaan dianggap sebagai warga yang memiliki kekuatan-kekuatan yang berharga dan perlu diperhatikan serta dikembangkan dengan baik, sehingga mereka dilibatkan secara penuh dalam melakukan langkah-langkah pemecahan masalah. Sedang pada model perencanaan sosial, komunitas sasaran dipandang sebagai konsumen (pengguna/penerima layanan), yang menerima serta memanfaatkan program dan layanan hasil dari proses perencanaan yang telah dilakukan oleh perencana dengan dibantu oleh tenaga ahli dari berbagai disiplin berdasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan, karena itu keterlibatan komunitas sasaran pasif. Untuk model aksi sosial, komunitas sasaran dianggap sebagai korban (victim) dari sistem/ketidakadilan (Adi, 2013).

#### 11. Konsepsi Mengenai Peran Penerima Layanan

Model pengembangan masyarakat lokal, komunitas sasaran berpartisipasi aktif dalam melakukan langkah-langkah pemecahan masalah, pelibatan secara aktif ini juga dalam rangka pengembangan diri komunitas sasaran. Untuk model perencanaan sosial, oleh karena komunitas sasaran dianggap sebagai konsumen maka peran komunitas sasaran menjadi pasif dalam melakukan langkah-langkah pemecahan masalah. Dan sebaliknya aktif dalam menggunakan layanan (mengonsumsi) yang diberikan subjek pemberdaya. Sedangkan model aksi sosial, peran penerima layanan adalah sebagai bawahan (employee) bersama dengan praktisi, sebagai konstituen dan anggota dalam melakukan aksi (Adi, 2013).

#### 12. Kategori Pemanfaatan Pemberdayaan

Pada model pengembangan masyarakat lokal, pemberdayaan digunakan untuk mengembangkan kapasitas komunitas untuk mengambil keputusan bersama, serta

membangkitkan rasa percaya diri akan kemampuan masing-masing anggota dalam komunitas. Sedangkan pada model perencanaan sosial, pemberdayaan digunakan untuk mencari tahu dari para pengguna jasa tentang layanan apa yang mereka butuhkan, serta memberitahu mereka tentang pilihan jasa/layanan yang ada yang merupakan solusi yang telah direncanakan untuk memecahkan masalah komunitas sasaran. Sedang pada model aksi sosial, pemberdayaan digunakan untuk meraih kekuasaan objektif bagi mereka yang tertindas/korban dari ketidakadilan agar dapat memilih dan memutuskan cara yang tepat untuk melakukan aksi, serta membangkitkan rasa percaya diri partisipan akan kemampuan mereka (Adi, 2013).

Suharto (2014) menjelaskan bahwa pada dasarnya model-model intervensi ini dikembangkan dalam kerangka analisis dan konseptualisasi. Sedang dalam praktiknya, ketiga model intervensi tersebut dapat bersentuhan satu sama lainnya. Sehingga komponen-komponen di dalamnya dapat dipergunakan secara kombinasi dan simultan, sesuai dengan kebutuhan dan situasi lapangan yang ada.

### **Komunitas Pemulung di TPST Piyungan dan Masalah Kesejahteraannya**

TPST Piyungan merupakan tempat pembuangan sampah akhir bagi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dan menampung jumlah sampah terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampah yang dikirim ke TPST Piyungan bisa mencapai 450-500-ton perhari. Adapun para pemulung di TPST Piyungan merupakan kumpulan pemulung yang tidak berasal dari satu wilayah saja. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Gunungkidul, Bantul, Yogyakarta, Kulonprogo Grobogan, Magelang, Klaten, Wonogiri, Blora, Riau, Flores, dan sebagainya. Itu didasarkan pada data pemulung yang sudah terdaftar melalui KTP berjumlah jumlah sekitar 453 orang dari total pemulung 600 orang. Para pemulung ini terbagi dalam beberapa kelompok yang mengikuti 15 pengepul yang berada di TPST Piyungan. Total 15 pengepul itu terdiri atas 14 dari warga sekitar TPST, dan 1 orang pengepul berasal dari luar wilayah TPST (Farid, IMEJ, 2019).

Permasalahan kesehatan merupakan isu kesejahteraan yang nyata dan spesifik dari para pemulung di TPST Piyungan ini. Resiko kesehatan para pemulung di TPST Piyungan rentan, sebab bekerja di gunung sampah bersama dengan ribuan sapi yang diliarikan di TPST (Farid, DIMAS, 2019). Selain itu kondisi TPST sangat kotor, sampah bau yang menyengat, banyak lalat, dan becek sebab air sampah (OTW MPM TVMU, 2018). Kesadaran para pemulung akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pun masih rendah, apalagi belum tersedia sarana prasarana air bersih di sekitar TPST secara memadai. Banyak dari pemulung tidak mencuci tangan terlebih dahulu ketika akan makan pada saat istirahat (OTW MPM TVMU, 2018), dan minimnya sarana air bersih juga menjadi salah satu faktor bagi kesulitan pemulung mengambil air wudu untuk menjalankan salat (Farid, DIMAS, 2019).

Berkerja dalam jangka waktu yang lama tersebut (bahkan ada yang hingga 15 sampai 22 tahun) di tempat demikian, memang para pemulung sebagian merasa kondisi kesehatannya baik-baik saja. Namun faktanya dari beberapa tokoh masyarakat, ditemukan banyak pemulung batuk tidak sembuh-sembuh, sesak nafas, gatal-gatal, sakit perut dan

sebagainya (Farid, IMEJ, 2019). Laporan lain menunjukkan banyak pemulung yang mengalami sakit, khususnya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), *mialgia* (nyeri otot), *dermatitis* (radang kulit), *dispepsia* (nyeri perut) dan sakit kepala (Widyaningsih dan Mar'ruf, 2017). Jaminan kesehatan makin terancam, khususnya para pemulung yang tidak dapat mengakses program layanan kesehatan gratis (walau mempunyai kartu Jaminan Kesehatan Nasional) sebab umumnya pemulung masih terdaftar di fasilitas layanan tingkat pertama (FKTP) di daerah asal sesuai alamat di KTP yang luar Piyungan (Farid, IMEJ, 2019).

Adapun mengenai kondisi ekonomi, para pemulung di TPST Piyungan memang memungkinkan pendapatannya mencapai Upah Minimum Kabupaten, misal di Bantul yang pada tahun 2016 sebesar Rp 1.297.700 (Firmansyah, 2020). Namun masalahnya adalah bagaimana mentransformasikan mereka untuk bekerja yang lebih layak. Beberapa yang menjadi sebab para pemulung ini memutuskan menjadi pemulung adalah mereka tidak memiliki keterampilan khusus di bidang yang selainnya, tentu ini juga karena faktor rendahnya pendidikan para pemulung. Sedang profesi pemulung tidak memerlukan keterampilan khusus sebagaimana sektor-sektor lain dan tidak terikat oleh waktu (Marwansyah, 2018). Di sinilah perlu dipikirkan bagaimana menjadikan para pemulung ini mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau setidaknya aman ketika mereka memulung.

Dari segi masalah sosial, kelompok pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan karena telah terstigma dengan pekerjaan yang di lingkungan tak layak dan kotor, dianggap sebagai *trouble maker* (Ramdani, 2018). Walau dari sisi lain sebenarnya mereka sangat berjasa untuk membantu mengurai sampah, yang ternyata dalam 1 tahun bisa berkontribusi dalam mengurangi 4.800 ton debit sampah di TPST Piyungan (Farid, DIMAS, 2019). Di sisi lain, kelompok pemulung ini kemudian menjadi terbaikannya karena tahun 2016, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial menyatakan pemulung tidak masuk kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga tidak berhak memperoleh berbagai program bantuan dari pemerintah (Farid, IMEJ, 2019)

Adapun pada aspek spiritual, MPM Muhammadiyah menyoroti tentang masalah fasilitas air bersih yang digunakan untuk salat. Selain itu juga permasalahan yang diungkapkan Maryono selaku perwakilan pemulung TPST Piyungan, bahwa masih banyak pemulung yang beragama Islam belum bisa membaca Al-Qur'an (Ramdani, 2018). Tentu selain itu bagaimana membina spiritualitas secara lebih kontinu perlu diusahakan sebagai penyempurna kesejahteraan para pemulung sehingga tidak hanya aspek fisik, ekonomi, dan sosial saja.

### **Intervensi MPM PP Muhammadiyah terhadap kelompok pemulung di TPST Piyungan**

Pada dasarnya dalam proses intervensi, MPM PP Muhamamdiyah menggandeng berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan bidang-bidang permasalahan pemulung.

Sebab MPM PP Muhammadiyah berpandangan bahwa dibutuhkan sinergisitas berbagai pihak dalam rangka menyelesaikan permasalahan pemulung (OTW MPM TVMU, 2018). Tahap awal, MPM PP Muhammadiyah mengadakan kegiatan *brainstorming* untuk menemukan permasalahan, kebutuhan serta potensi pemulung di TPST Piyungan yang dapat diperlukan untuk menemukan solusi atas permasalahan dan merealisasikan kebutuhan-kebutuhan pemulung. Pada tanggal 24 Maret 2016 diskusi diadakan dengan melibatkan beberapa pihak yakni Balai PISAM (Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum) Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekber Kartamantul (Sekretariat Bersama Daerah Yogyakarta Sleman dan Bantul), serta perwakilan dari Kelompok Pemulung TPST Piyungan (Ramdani, 2018). Dari hasil kegiatan *brainstorming* tersebut ditemukan beberapa masalah pemulung antara lain: pemulung di TPST Piyungan termasuk kelompok yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Selama ini program dari pemerintah di TPST Piyungan kurang fokus pada manusianya, khususnya kesehatan dan lingkungan yang terdampak sampah, tetapi lebih pada infrastrukturnya seperti bangunan TPST atau jalan (OTW MPM TVMU, 2018). Selain itu, pemulung juga mengalami stigmatisasi. Mereka kerap kali dianggap *trouble maker*, padahal pemulung di TPST Piyungan ini dapat dikatakan sebagai pahlawan lingkungan yang telah membantu dalam melakukan pemilahan sampah dan mengurangi sampah di TPST Piyungan.

Setelah kegiatan *braistorming* di atas, MPM PP Muhammadiyah merealisasikan program-program pemberdayaan. Program yang pertama adalah pembentukan dan peresmian Komunitas Pemulung Mardiko (singkatan dari Makaryo Adi Ngayogyokarto yang juga diartikan sebagai pahlawan lingkungan) yang dilaksanakan pada 10 April 2016 (Ramdani, 2018). Sehingga komunitas ini menyatukan kelompok pemulung yang sebelumnya terbagi dalam beberapa kelompok mengikuti 15 pengepul yang ada di TPST Piyungan (Farid, IMEJ, 2019). Kegiatan peresmian komunitas Mardiko ini selain dihadiri oleh anggota komunitas Mardiko dan MPM PP Muhammadiyah juga dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan dari pemerintah dan Organisasi Ortom Muhammadiyah (Ramdani, 2018). Selain untuk menyatukan para pemulung TPST Piyungan menjadi satu wadah, pembentukan kelompok pemulung Mardiko juga untuk merubah anggapan negatif terhadap profesi pemulung, khususnya di TPST Piyungan yang dianggap sebagai penimbul masalah (Ramdani, 2018).

Setelah peresmian komunitas, selanjutnya ada pendataan anggota Mardiko dan penyusunan struktur kepengurusan komunitas. Anggota dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Mardiko yang digunakan sebagai identitas dan kartu jaminan kesehatan ke rumah sakit Muhammadiyah, sehingga pemulung bisa diberikan keringanan biaya jika berobat (Marwansyah, 2018). Dengan kartu tersebut juga, pemiliknya berhak mengikuti program-program pemberdayaan MPM PP Muhammadiyah (OTW MPM TVMU, 2018). Selanjutnya, MPM PP Muhammadiyah dan pengurus Mardiko mengadakan audiensi dengan pengurus TPST Piyungan untuk memperkenalkan diri, serta meyakinkan pengurus

TPST Piyungan bahwa yang dilakukan komunitas Mardiko dengan mengikuti program-program pemberdayaan MPM PP Muhammadiyah tak akan mengganggu kinerja pemungutan sampah. Ini dilakukan sebab ada kekhawatiran dari pengurus TPST Piyungan akan gangguan tersebut. Audiensi ini dilakukan juga dalam rangka meminta bantuan sekretariat yang bisa digunakan oleh komunitas (Farid, IMEJ, 2019).

Kemudian, MPM PP Muhammadiyah juga mendampingi pembuatan aturan-aturan komunitas yang wajib ditaati oleh anggota Mardiko, serta penetapan agenda rutin pertemuan pengurus, anggota Mardiko, pengepul dan masyarakat di sekitar TPST Piyungan. Aturan-aturan tersebut antara lain: (Ramdani, 2018)

1. Setiap anggota wajib menjaga keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan di lingkungan TPST
2. Setiap anggota wajib mentaati keputusan pengurus dalam penataan lapak
3. Setiap anggota wajib menjaga kerukunan dan kesejahteraan antara pengelola, pengepul, dan masyarakat
4. Bila terbukti melanggar aturan, anggota bersedia dikeluarkan dari komunitas dan tidak diperkenankan memulung di TPST Piyungan

Adapun agenda rutin pertemuan komunitas Mardiko dimaksudkan untuk membahas permasalahan yang dialami pemulung dan masyarakat, serta mengkomunikasikan program yang akan dilakukan MPM PP Muhammadiyah untuk pemulung (Farid, IMEJ, 2019). Dengan demikian, komunitas Mardiko ini juga bertujuan sebagai sarana pemulung dalam menyampaikan aspirasi kepada pihak pengelola TPST maupun pemerintah terkait (Marwansyah, 2018), dan juga sebagai penguatan posisi tawar bagi pemulung untuk menjalin relasi kerjasama dengan pihak lain.

Selanjutnya setelah adanya komunitas tersebut, intervensi pada aspek kesehatan, pengembangan kapasitas organisasi, dan spiritual juga dilakukan. Pada pertemuan-pertemuan rutin tersebut menjadi kesempatan untuk memberikan siraman rohani, selain juga ada pelatihan membaca buku *Iqra* bagi pemulung yang belum bisa membaca Al-Qur'an (Ramdani, 2018). Pelatihan-pelatihan perilaku hidup bersih dan sehat juga bisa memanfaatkan pertemuan-pertemuan rutin tersebut, seperti pelatihan yang melibatkan mahasiswa dari Universitas Aisyiyah Yogyakarta untuk membiasakan pemulung mencuci tangan dengan benar (Ramdani, 2018). Selain itu terdapat pula program pelatihan TI (Teknologi Informasi) dengan memberikan pengenalan dasar-dasar komputer, dan pelatihan dalam pembuatan surat, undangan, proposal dan undangan. Pelatihan ini melibatkan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu malam sesudah salat isya mulai dari bulan Januari-Februari 2017 (Farid, IMEJ, 2019).

Untuk melengkapi program layanan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi komunitas, MPM PP Muhammadiyah melakukan pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan, Diadakanlah pengecekan kesehatan secara tematik (penyakit-penyakit tertentu)

dengan menyesuaikan pada keluhan yang sering dirasakan oleh para pemulung dari pengecekan-pengecekan sebelumnya (OTW MPM TVMU, 2018). Selain juga pemeriksaan kesehatan berupa tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Terdapat juga pemeriksaan paparan logam berat yang terdapat pada tubuh pemulung (Marwansyah, 2018). Beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ini selain pihak MPM PP Muhammadiyah yaitu Lazizmu, PKU Muhammadiyah, dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Ramdani, 2018). MPM PP Muhammadiyah juga membiasakan para pemulung untuk mencuci tangan dengan memberikan penyuluhan kebersihan dan kesehatan, serta menyediakan padasan yang menampung air bersih yang dapat digunakan oleh para pemulung untuk mencuci tangan maupun wudu ketika akan salat (Farid, IMEJ, 2019).

Dalam merealisasikan padasan tersebut, MPM PP Muhammadiyah mengajak komunitas Mardiko, kepala dusun dan masyarakat sekitar TPST Piyungan berdiskusi yang hasilnya akan dibangun padasan di tiga titik sekitar TPST dekat lokasi pengepul dan lokasi tempat pemulung memilah sampah. Ketiga titik tempat tersebut ternyata merupakan milik masyarakat sekitar TPST yang bersedia dengan sukarela mewakafkan tanahnya. Kepala dusun juga menggerakkan warganya untuk gotong royong membangun padasan. Masyarakat beserta pemulung bergotong royong dalam membangun padasan tersebut (Ramdani, 2018), selain juga terdapat beberapa stakeholder yang terlibat, seperti Lazizmu dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Farid, IMEJ, 2019). Dalam pengisian air padasan, telah disepakati pengisian awal sekitar tiga sampai empat kali pengisian akan disuplai MPM PP Muhammadiyah, tetapi selanjutnya pemulung akan iuran untuk pengisiannya (Riz, 2020).

Sedangkan pada aspek perbaikan ekonomi dan lingkungan TPST, MPM PP Muhammadiyah mengadakan Workshop Pemberdayaan Komunitas Pemulung di DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2017 dengan mengundang 70 peserta meliputi unsur pemerintah provinsi, kabupaten/kota; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); perguruan tinggi; ortom Muhammadiyah; dan perwakilan dari komunitas pemulung Mardiko (Ramdani, 2018). Di workshop, dibahas mengenai lingkungan TPST Piyungan yang diharapkan adanya temuan teknologi yang bermanfaat dan tepat guna dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan, sehingga meminimalisasi dampak buruk bagi pemulung (Ramdani, 2018). Sedangkan dalam hal ekonomi, sebagai hasil dari advokasi melalui workshop tersebut, ditindaklanjuti dengan adanya program workshop pengolahan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY. Dalam workshop tersebut, beberapa pemulung diberikan pelatihan membuat olahan pangan seperti mie ayam, pastel, dan juga keripik pisang. Selain diberikan pelatihan, peserta juga diberikan bantuan alat untuk mengolahnya (Ramdani, 2018), serta diajarkan pula cara memasarkannya (Marwansyah, 2018). Sudah ada lima dari 30 pemulung yang mengikuti workshop ini yang beralih profesi menjadi penjual mie ayam yang dibuat sendiri tanpa pengawet dengan omzet penjualan sekitar 40 sampai 50 mangkok per hari dengan harga

tujuh ribu rupiah permangkoknya. Selain itu, alasan memilih keripik pisang, sebab pisang menjadi salah satu potensi yang ada di TPST Piyungan, karena ada banyak pohon pisang (OTW MPM TVMU, 2018).

Tindak lanjut lain dari workshop di atas ialah menggandeng Dinas Koperasi untuk terlibat dalam pendirian koperasi pemulung, dan memberikan pelatihan mengelola koperasi kepada pemulung. Selain itu terdapat pula Bank Indonesia yang memberikan pelatihan manajemen keuangan untuk pemulung (Ramdani, 2018). Usaha ini sesuai dengan salah satu sub bahasan workshop bersama mengenai usaha pendirian koperasi pemulung, sehingga dengan adanya unit usaha mikro membuka jalan pemerintah bisa melakukan intervensi di dalamnya. Sebab sebenarnya pemerintah telah ada alokasi dana Bansos (Bantuan Sosial) bagi koperasi. Namun sesuai undang-undang, syaratnya koperasi haruslah berbadan hukum (Layar Jogja, 2017).

### **Kombinasi Komponen-komponen Model Intervensi Komunitas di TPST Piyungan**

Pada komponen batasan definisi penerima layanan, kombinasi dan simultansi terjadi karena kelompok pemulung ini memang dapat diidentifikasi dalam satu wilayah geografis dalam model pengembangan masyarakat lokal, juga sebagai kesatuan fungsional dalam model perencanaan sosial, dan maupun sebagai segmen kelompok terabaikan dari layanan kesejahteraan yang harusnya didapatkan. Dalam kesatuan wilayahnya, komunitas ini berada pada lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Piyungan, dusun Ngablak, desa Stimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta (Ramdani, 2018). Sedang sebagai kesatuan fungsional penerima layanan adalah kelompok pemulung yang akan dibantu mengatasi masalah-masalah khususnya pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan spiritual (Ramdani, 2018). Masalah-masalah itu menjadi penting untuk ditolong karena treatment pemerintah di TPST Piyungan yang kurang fokus pada manusianya, masih lebih pada infrastrukturnya seperti bangunan TPST atau jalan (OTW MPM TVMU, 2018). Sehingga kelompok ini kurang diperhatikan, bahkan sempat dianggap sebagai *trouble maker* (Ramdani, 2018).

Pada komponen struktur dan masalah komunitas, struktur dalam masalah khas model pengembangan masyarakat lokal, dapat dilihat pada struktur relasi antar pemulung yang tidak terkoordinasi dengan baik (karena masih masih terbagi menjadi beberapa kelompok mengikuti 15 pengepul yang ada di TPST Piyungan), padahal keberadaan mereka memiliki potensi untuk menangani masalah yang seharusnya bisa dipandang sebagai masalah bersama, terutama berkaitan penyelenggaraan usaha kesehatan dan kebersihan, kerukunan antar pemulung, ketertiban dan keamanan serta menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak lain, sebagaimana yang tercermin nantinya dalam lahirnya aturan-aturan komunitas Mardiko (Ramdani, 2018). Selain itu rendahnya kemampuan untuk bekerja pada sektor yang lebih baik atau menumbuhkan ekonomi mandiri juga merupakan masalah dalam model intervensi ini. Adapun struktur dan masalah komunitas untuk model perencanaan sosial dijumpai berupa masalah rentannya kesehatan di lingkungan yang kotor, dan kebutuhan pelayanan spiritual. Kerentanan itu menjadi lebih tinggi karena

keterabaian nasib para pemulung dengan adanya keputusan pemulung tidak masuk PMKS, tidak ada bantuan dari pemerintah untuk kesejahteraan padahal mereka juga berjasa (pahlawan lingkungan), serta stigma *trouble maker* oleh lingkungan sosialnya. Dengan melihat struktur dan masalah komunitas tersebut, komponen selanjutnya yakni mengenai konsepsi penerima layanan otomatis mencerminkan dua model intervensi, yakni komunitas dikembangkan kekuatan dan relasi antar anggotanya untuk pemecahan masalah komunitas bersama tersebut (model pengembangan masyarakat lokal, juga komunitas sebagai konsumen atas layanan-layanan yang diselenggarakan MPM PP Muhammadiyah dengan menggandeng berbagai pihak termasuk pemerintah (model perencanaan sosial).

Selanjutnya komponen asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam komunitas, dapat dijelaskan bahwa upaya mencapai kemufakatan dalam aturan-aturan komunitas untuk penyelenggaraan usaha kesehatan dan kebersihan, kerukunan antar pemulung, ketertiban dan keamanan, menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak lain, serta pengembangan ekonomi mandiri komunitas merupakan ciri khas asumsi kepentingan pada model pengembangan masyarakat lokal. Sedangkan pada model perencanaan sosial, kepentingan pragmatis untuk menyelesaikan masalah kerentanan atas kesehatan, dan peningkatan pemenuhan kebutuhan spiritual adalah asumsi kepentingan dalam model ini. Dalam mengupayakan kepentingan pragmatis ini dilibatkan usaha mengupayakan perhatian pemerintah dan lingkungan sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan, dengan menghilangkan stigma sebagai *trouble maker* dengan sebaliknya mengingatkan akan jasa para pemulung sebagai pahlawan lingkungan. Di sini terlihat bagaimana komponen kepentingan pada perencanaan sosial dan pengembangan masyarakat lokal berupa kebutuhan kesejahteraan kesehatan, dan peningkatan keterampilan ekonomi ternyata merupakan kepentingan yang juga terdapat dalam advokasi program perencanaan sosial atas pemangku kekuasaan. Tuntutan adanya teknologi yang bermanfaat dan tepat guna dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sehingga meminimalisasi dampak buruk bagi pemulung, serta pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait, seperti dinas sosial dan dinas koperasi untuk meningkatkan keterampilan ekonomi komunitas, merupakan hasil dari advokasi program perencanaan sosial yang bersentuhan dengan kepentingan perencanaan sosial lainnya yang dimotori MPM PP Muhammadiyah dan pengembangan masyarakat lokalnya.

Adapun pada komponen tujuan intervensi, tujuan mengembangkan relasi kerjasama antar anggota dengan membentuk organisasi Komunitas Mardiko dengan mengembangkan dan memelihara sistem komunitas yang mengarah pada pengupayaan kesehatan dan kebersihan, kerukunan antar pemulung, ketertiban dan keamanan, menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak lain, serta menstimulasi partisipasi dalam komunitas dan kepemimpinan dengan pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan, termasuk kegiatan-kegiatan meningkatkan kemampuan komunitas seperti pelatihan teknologi informasi, pelatihan tentang koperasi hingga pelatihan pengolahan pangan adalah tujuan-tujuan pada model pengembangan masyarakat lokal. Adapun tujuan khas pada model perencanaan

sosial menyoar pemecahan kesehatan dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemeriksanaan kesehatan, hingga dan Layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang dimiliki Muhammadiyah. Sedangkan advokasi program perencanaan sosial atas pemangku kekuasaan lebih kepada untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah, dan agar pemerintah memberikan pelayanan untuk kesejahteraan para pemulung. Aspek tujuan advokasi tersebut, bersentuhan dengan tujuan pelayanan kesehatan di perencanaan sosial yang murni dijalankan MPM PP Muhammadiyah, maupun tujuan pengembangan kemampuan komunitasnya. Sehingga hasil dari advokasi tersebut dapat menjadi pemenuhan atas tujuan pada model pengembangan masyarakat lokal dan perencanaan sosial lainnya.

Mengenai komponen strategi dasar dalam intervensi komunitas, didapati strategi pelibatan komunitas pemulung dalam mengatur kebaikan bersama khususnya mengenai kebersihan, kesehatan, ketertiban, keamanan lingkungan serta mengembangkan kapasitas keterampilan ekonomi komunitas. Strategi ini merupakan strategi dasar untuk model pengembangan masyarakat lokal. Adapun strategi pada perencanaan sosial dilakukan dengan mendata kebutuhan komunitas yang kemudian mengerucut pada persoalan kesehatan, spiritual, dan kemampuan keterampilan ekonomi, serta keterabaian sosial. Hanya saja kemudian masalah-masalah itu tidak lantas direspon dengan pendekatan perencanaan sosial murni dari MPM PP Muhammadiyah, namun melibatkan penyelesaian dengan advokasi program perencanaan sosial atas pemangku kekuasaan. Seperti pendidikan keterampilan ekonomi komunitas yang diusahakan pula melalui advokasi yang berbuah fasilitas program pengembangan kapasitas komunitas dengan adanya pelatihan-pelatihan ekonomi mandiri dari dinas-dinas terkait. Sedang masalah yang diselesaikan dengan model perencanaan sosial murni dari MPM PP Muhammadiyah adalah masalah kesehatan dan spiritual dengan mengadakan program peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyuluhan dan pemeriksaan serta layanan kesehatan, serta pelatihan mengaji dan ceramah-ceramah keagamaan. Adapun pada strategi pelibatan komunitas pemulung dengan mengorganisasikan diri dalam komunitas *Mardiko*, juga menjadi sarana kekuatan untuk mengumpulkan dan menyampaikan aspirasi atas peningkatan kesejahteraan mereka yang diadvokasikan kepada para pemangku kebijakan.

Selanjutnya mengenai komponen taktik dan teknik perubahan, model pengembangan masyarakat lokal di komunitas diketahui menggunakan usaha mencapai konsensus keorganisasian sebagaimana MPM PP Muhammadiyah mendampingi mereka dalam merumuskan tata tertib, mendorong iuran bersama untuk kepentingan penyelenggaraan kebersihan dan kesehatan komunitas, dan mengembangkan diskusi kelompok untuk melihat masalah dan membicarakan cara-cara penyelesaiannya, serta dilakukan pelatihan untuk pengembangan komunitas seperti pelatihan IT, pengolahan pangan, dan pendirian koperasi. Adapun pada model perencanaan sosial yang murni dari MPM PP Muhammadiyah, diketahui taktik dan teknik perubahannya adalah penelusuran masalah kesehatan dan kebutuhan peningkatan spiritual, sehingga melahirkan program

pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan, memberikan fasilitas kesehatan seperti pendirian padasan, serta memberikan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang dimiliki Muhammadiyah sehingga ada keringanan biaya. Sedang pada teknik advokasi program kesejahteraan sosial atas pemangku kekuasaan, dilakukan dengan mengorganisasi dan mencari kebutuhan-kebutuhan komunitas, lalu melakukan pembelaan dalam forum aspirasi yang digagas oleh MPM PP Muhammadiyah dengan pemangku kepentingan dan kebijakan yang lain. Di sini taktik dan teknik perubahan dalam hal pengorganisasian dalam model pengembangan masyarakat lokal yang awalnya digunakan untuk membangun sistem relasi yang menyelesaikan masalah-masalah internal pemulung, secara simultan dapat digunakan untuk menggali kebutuhan-kebutuhan komunitas, yang kemudian aspirasi komunitas disampaikan kepada pemangku kebijakan yang terkait. Begitu juga dengan taktik advokasi dalam perencanaan sosial yang mendorong program kesejahteraan dari pihak yang diaspirasikan kepada pemangku kebijakan, menghasilkan program-program yang dapat digunakan dalam pengembangan masyarakat lokal seperti program-program latihan pengembangan kapasitas keterampilan ekonomi komunitas yang diselenggarakan oleh dinas-dinas terkait.

Dengan melihat taktik dan teknik perubahan, terlihat juga komponen media intervensi juga mengalami kesimultanan. Pada pengadaan kelompok-kelompok diskusi dan bimbingan, selain digunakan untuk model pengembangan masyarakat lokal untuk menghasilkan konsensus sistem relasi sosial komunitas untuk menyelenggarakan kebersihan, kesehatan, kemananan, ketertiban serta peningkatan kapasitas komunitas, juga menjadi ajang pengorganisasian komunitas untuk merumuskan aspirasi yang kemudian dibawa pada forum-forum advokasi yang dikemas sebagai forum diskusi bersama dengan para pemangku kebijakan dan berbagai *stake holder* lainnya, yang merupakan media penting dalam perencanaan sosial. Dengan demikian forum-forum diskusi kelompok serta diskusi dengan para *stake holder* juga menjadi sarana untuk mengetahui layanan-layanan kesejahteraan apa yang perlu diberikan, serta mendorong lembaga-lembaga yang dijalin relasinya untuk menyelenggarakan layanan-layanan kesejahteraan bagi komunitas sesuai dalam model perencanaan sosial.

Pada komponen peran praktisi serta peran penerima layanan juga mencerminkan kombinasi model intervensi ini. Pada satu sisi, MPM PP Muhammadiyah selaku praktisinya, menjadi *anabler* yang membimbing komunitas untuk membangun sistem relasi sosial untuk pemecahan masalah-masalah komunitas sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, yang mana ini merupakan peran khas praktisi pada model pengembangan masyarakat lokal. Dengan demikian peranan komunitas selaku penerima layanan adalah melibatkan diri dalam partisipasi aktif dalam sistem relasi yang dibangun. Turut dalam diskusi pertemuan komunitas rutin, mengikuti tata tertib komunitas dan berkontribusi dalam pengembangan kapasitas komunitas. Di sisi lain, MPM PP Muhammadiyah juga dapat dikatakan sebagai pakar yang mengumpulkan data-data masalah kesejahteraan komunitas, dan mengembangkan layanan-layanan kesejahteraan seperti layanan

kesehatan dan peningkatan spiritual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, serta menjalin relasi dengan berbagai lembaga yang berkompetensi dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial yang dimaksud. Dengan demikian komunitas menjadi konsumen atas layanan-layanan ini. Pada sisi ini merupakan ciri khas pada model perencanaan sosial. selain itu, MPM PP Muhammadiyah telah menjalankan peran sebagai fasilitator yang mendorong lahirnya aspirasi dalam forum-forum internal komunitas, dan menyelenggarakan forum-forum penyampaian aspirasi dengan para pemangku kebijakan terkait. Dengan partisipasi komunitas dalam forum-forum aspirasi dengan pemangku kebijakan, menjadikan komunitas sebagai konsumen yang mengaspirasikan kebutuhannya untuk dilayani.

Berikutnya dalam hal komponen orientasi terhadap struktur kekuasaan, pada model pengembangan masyarakat lokal tidak ditemukan orientasi terhadap struktur kekuasaan sebab komunitas bukan wilayah administratif dengan kekuasaan pemerintahan tersendiri. Kalaupun ada struktur kekuasaan dalam komunitas, tidak lain adalah kepemimpinan dalam komunitas itu sendiri. Sedang dalam model perencanaan sosial, MPM PP Muhammadiyah dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial berupa fasilitas kesehatan, misal pada pembangunan padasan, menjadikan struktur kekuasaan setempat sebagai sponsor (pendukung, bersama dengan *stake holder* lain yang dijalin oleh MPM PP Muhammadiyah) layanan dengan memobilisasi warga turut terlibat dalam pembangunan. Selebihnya MPM PP Muhammadiyah menjadikan para pemangku kebijakan (seperti pengelola TPST Piyungan, dinas-dinas terkait) sebagai sponsor atas program-program kesejahteraan yang diaspirasikan untuk diadakan bagi komunitas pemulung.

Dan akhirnya pada komponen pemanfaatan pemberdayaan, terdapat pemanfaatan pemberdayaan yakni untuk mengembangkan kapasitas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah bersama dalam komunitas dengan pengembangan relasi komunitas dalam wadah Komunitas Pemulung Mardiko, dan juga untuk mengembangkan kemampuan keterampilan ekonomi komunitas, sebagai komponen dari model pengembangan masyarakat lokal. Selain itu terdapat pula pemanfaatan pemberdayaan yang digunakan untuk mengetahui masalah, kebutuhan komunitas, serta untuk memberi layanan secara langsung penyelesaian atas masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada, sebagaimana pada model perencanaan sosial.

### **Kesimpulan**

Kombinasi kedua model intervensi lahir karena tuntutan struktur dan masalah yang ada juga mencerminkan kebutuhan lahirnya kedua model. Awalnya kelompok pemulung kurang terkoordinasi dengan baik karena terpecah dalam beberapa kelompok tanpa memiliki sistem relasi antar pemulung yang seharusnya mampu menangani masalah bersama baik yang berkaitan dengan masalah kebersihan, kesehatan, keamanan, ketertiban, kerukunan, dan menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak terkait di lingkungan TPST Piyungan, bahkan mengembangkan kemampuan ekonomi komunitas.

Di sisi lain, kelompok pemulung ini juga menghadapi masalah-masalah nyata terutama masalah kerentanan aspek kesehatan, dan kebutuhan peningkatan spiritualitas yang membutuhkan layanan langsung. Keadaan masalah semakin memprihatinkan karena kelompok pemulung ini juga mengalami marginalisasi, dengan ketidadaan perhatian yang cukup dari pemerintah atas kondisi kesejahteraan para pemulung yang sebenarnya merupakan pahlawan lingkungan. Kedua kondisi tersebutlah yang mendorong diterapkannya kombinasi model intervensi pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial. Kombinasi itu semakin mungkin karena kelompok pemulung ini juga dapat diidentifikasi dalam satu wilayah geografis dalam model pengembangan masyarakat lokal, juga sebagai kesatuan fungsional dalam model perencanaan sosial. Dengan penerapan kedua model intervensi komunitas, otomatis komponen-komponen intervensi komunitas lainnya terkonstruksi dalam kedua model tersebut, baik tujuan, strategi dasar, taktik dan teknik perubahan, media, peran praktisi dan peran penerima layanan, asumsi kepentingan kelompok-kelompok, orientasi struktur kekuasaan, hingga pemanfaatan pemberdayaan. Namun jika diperhatikan, maka akan ditemukan ada komponen-komponen intervensi yang secara simultan dan sangat terikat dari model satu atas model lain yang diterapkan.

Dalam hal komponen tujuan intervensi, tujuan pada model pengembangan masyarakat lokal yang berupa mengembangkan relasi kerjasama antar anggota dengan membentuk organisasi Komunitas Mardiko yang akan mengembangkan dan memelihara sistem komunitas dalam memenuhi kebutuhan bersama, nampaknya juga bersinergi dengan tujuan pada model perencanaan sosial. Di mana dengan adanya wadah komunitas tersebut, akan mendukung tujuan mencari kebutuhan-kebutuhan Komunitas Mardiko yang kemudian disampaikan aspirasinya ke pemerintah, harapannya pemerintah memberikan program pelayanan untuk kesejahteraan para pemulung. Hasil dari mendorong adanya pelayanan dari pemangku kebijakan, nampaknya bersinergi pula dengan tujuan perencanaan sosial lainnya yang mengarah pada aspirasi adanya program pengembangan teknologi yang bermanfaat dan tepat guna dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan, sehingga meminimalisasi dampak buruk bagi kesehatan pemulung. Hasil dari usaha penyampaian aspirasi itu nampaknya juga bersinergi pula dengan tujuan pengembangan masyarakat lokal yang berorientasi pada usaha peningkatan kapasitas komunitas, yakni dengan munculnya pelatihan-pelatihan dari dinas-dinas terkait yang merupakan hasil advokasi sosial.

Dengan sinergi tujuan model-model intervensi yang demikian, tentu strategi dasar, taktik dan teknik perubahan yang diterapkan akan terhubung pada tujuan-tujuan tersebut. Pada akhirnya dapat dilihat pula pada penggunaan media-media perubahannya. Kelompok-kelompok diskusi dapat menjadi ajang untuk membangun konsensus sistem pemecahan masalah komunitas bersama sebagaimana pada model pengembangan masyarakat lokal, namun pada saat yang lain bisa menjadi ajang pengkristalan aspirasi-aspirasi yang akan diadvokasikan ke pemangku kebijakan pada perumusan program kesejahteraan oleh

pemangku kebijakan. Serta dimungkinkan hasil-hasil diskusi dalam kelompok itu kemudian digunakan untuk memetakan masalah-masalah nyata yang dihadapi komunitas, yang akan diselesaikan dengan pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan pada model perencanaan sosial murni oleh MPM PP Muhammadiyah. Di sinilah terjadi pemanfaatan komponen intervensi secara lebih efisien, karena dapat menunjang penerapan model-model intervensi yang digunakan.

Selain itu kita bisa melihat hasil dari pemanfaatan kombinasi model-model intervensi ini adalah adanya kontribusi perbaikan yang saling melengkapi masing-masing model. Dalam satu komunitas, persoalan yang dihadapi bisa dipetakan secara berbeda untuk diberikan model intervensi secara berbeda pula, namun saling mendukung perubahan. Dalam kasus Komunitas Mardiko ini, kesejahteraan komunitas ini memang seharusnya perlu mendapat perhatian dari pemangku kebijakan, sehingga harus dilakukan advokasi terhadap komunitas marginal agar mereka mendapatkan program layanan sesuai kebutuhannya. Namun dalam waktu yang sama, masalah kesejahteraan yang nyata juga harus segera diselesaikan. Inilah yang kemudian melahirkan pelayanan-pelayanan khususnya pada aspek kesehatan yang banyak ditangani oleh MPM PP Muhammadiyah dengan berbagai relasi (non-pemerintah) yang dibangunnya lewat program perencanaan sosialnya, sehingga perbaikan keadaan tidak menunggu hasil dari advokasi saja. Di sisi lain, komunitas harus dikembangkan agar penyelesaian masalah komunitas bisa mandiri, dan memiliki kapasitas untuk mendapatkan kesempatan bekerja yang lebih baik. Pengembangan kapasitas lokal ini dapat dilakukan baik dengan pendampingan dari model pemberdayaan masyarakat lokal MPM PP Muhammadiyah, juga bisa dilengkapi dari advokasi yang berhasil mendorong turunnya intervensi kesejahteraan dari pemangku kebijakan dalam bentuk program pengembangan kapasitas lokal.

### Daftar Pustaka

- AB, Syamsuddin. 2017. *Benang-Benang Merah Teori Kesejahteraan Sosial*. Ponorogo: Penerbit Wade
- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Adi, Isbandi Rukminto. 2015. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Conny R. Semiawan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. 2019. Derap Langkah Pemuda sebagai Fasilitator Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. *DIMAS: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan, UIN Walisongo*. 19. no. 02: 221-234.
- Farid, Muhammad Rifa'at Adiakarti. 2019. Peran Pemuda Majelis Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendampingan Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan

- Sampah Terpadu. *IMEJ: Islamic Manajement and Empowerment Journal*. 01. no.02: 161–176.
- Firmansyah, M Resya. 2020. *Ini Dia Besaran UMK 2016 Masing-masing Kabupaten di DIY* <https://jogja.tribunnews.com/2015/11/02/ini-dia-besaran-umk-2016-masing-masing-kabupaten-di-diy>
- Marwansyah, Gandi Alan. 2018. *Analisis Peran Organisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Alur Pengelolaan di TPST Piyungan, Bantul, Yogyakarta*. Skripsi-- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- OTW MPM TVMU. 2018. *Potret TPST Piyungan Seg 1* [https://www.youtube.com/watch?v=LVKp\\_2cPUIE](https://www.youtube.com/watch?v=LVKp_2cPUIE)
- OTW MPM TVMU. 2018. *Potret TPST Piyungan Seg 2* <https://www.youtube.com/watch?v=GT1GgwOGAUA>
- OTW MPM TVMU. 2018. *Potret TPST Piyungan Seg 3* <https://www.youtube.com/watch?v=qALvp28>
- OTW MPM TVMU. 2018. *Potret TPST Piyungan Seg 4* <https://www.youtube.com/watch?v=mRGNiha3H0c>
- Layar Jogja. 2017. *Pemberdayaan Komunitas Pemulung Piyungan Bersama MPM Muhammadiyah* <https://www.youtube.com/watch?v=Idta9UCmUpA>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2015. *Tanfidz Keputusan Muktamar ke-47*. Yogyakarta: Gramasurya
- Ramdani, Febri. 2018. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Menurut Muhammadiyah (Studi Kasus di TPST Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta)*. Skripsi-- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- SM, Riz. 2019. *Komunitas Pemulung Mardiko: Terima Kasih MPM* <https://www.suaramuhammadiyah.id/2019/03/23/komunitas-pemulung-mardiko-terima-kasih-mpm/>.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Membedayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Widyaningsih, Tri dan Ahmad Ma'ruf. 2017. Eksternalitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*. 18. no. 01: 86-103.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.